STRATEGI PEMERINTAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI PASCA COVID-19 DAN MEWUJUDKAN SDGS

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang ingin terus menuju sebuah keberhasilan pembangunan dalam semua sektor menghadirkan istilah baru yaitu *Sustanaible Development Goals (SGDs)* yaitu sebuah harapan pembangunan dalam sektor ekonomi untuk mewujudkan keseimbangan dan pemerataan dari semua daerah. Pembangunan ini tentunya berkaitan dengan bagaimana cara negara untuk mewujudkan pembangunan yang merata khusunya di negara berkembang. *Sustanaible Development Goals (SGDs)* menghadirkan sebuah permasalahan baru bagi negara berkembang akibat kurangnya sumber daya manusia yang tidak mendukung serta belum mampu memanfaatkan perkembangan teknologi seperti negara maju lainnya. Periode yang diharapkan dari pembangunan berkelanjutan yaitu 2016-2030 pertama kali SDGs didirikan pada markas PBB yang menetukan sebuah strategi yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 24 indikator dalam skala global. Target dan indikator tersebut tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik (Rahadian, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk cerminan dari perkembangan perekonomian selama kurun waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Selain itu, perkembangan tersebut diperlihatkan berupa persentase dari pendapatan nasional yang mengalami perubahan pada satu waktu dibandingkan dengan waktu sebelumnya (Regina, 2022) . Berdasarkan Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa perubahan pendapatan nasional merupakan jumlah nilai tambah dari suatu negara tertentu yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian baik unit usaha, jasa dan barang atau disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam kegiatan masyarakat, suatu proses ketika produksi jasa dan barang mengalami peningkatan yang mana berhubungan terhadap adanya alokasi yang efisien, biaya minimum, dan pengoptimalan dari terbatasnya sumber daya yang ada merupakan bentuk dari pertumbuhan ekonomi (Lusya & Anis, 2019) .

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting untuk menggambarkan bagaimana pendapatan masyarakat di suatu negara atau wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pencapaian pembangunan (Nugraeni & Aji, 2021). Suatu negara akan selalu berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakatnya sebagai bentuk tujuan utama dari pemerintahan negara agar kualitas hidup meningkat serta menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Peran penting pemerintah yang dapat kita jadikan potensi dalam menangani covid-19 yaitu penepatan harga minimum yang bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu beras dimana hal ini sangat diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena kita tahu banyak sekali banyak sekali pekerja yang harus kehilangan pekerjaan karena pandemic covid-19. Potensi kedua yang dapat dilakukan pemerintah yaitu pemberian subsidi, pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi.

Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Potensi ini harus kita laksanakan untuk membangkitkan ekonomi di Indonesia agar ekonomi kembali normal. Kita tidak bisa menyangkal bahwa dengan adanya pandemi covid-19 menurunkan perekonomian yang ada di sebuah Negara tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di Negara lain. Sebagai pemerintah ini hal yang harus di perhatikan agar tidak ada satu masyarakat yang mengalami kesengsaraan akibat tidak meratanya sebuah tahapan dalam pemulihan ekonomi. Indonesia memiliki banyak potensi yang harus selalu di kembangkan dan perlu di perhatikan sebagai sarana pemenuhan dan pemulihan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi, misalnya Sumber Daya Alam (SDA) dan infastruktur yang tersedia di negara tersebut (Todaro, 2009). Teori Chenery, dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan pada

perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsisten) ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Stabilisasi

Kebijakan stabilisasi merupakan kebijakan yang memuat tentang pengendalian sebuah negara untuk mencegah terjadinya sebuah lonjakan harga yang dapat menggangu jalannya pertumbuhan ekonomi di sebuah negara, melalui kebijakan stabilisasi ini diharapkan dapat mencegah sebuah permasalahan inflasi maupun deflasi.

Teori yang disampaikan oleh Keynes dalam General Theory Of Employment Interest and Money pada tahun 1935 menjelaskan bahwa kebijakan stabilisasi sendiri dimana pasar tidak secara otomatis dapat menghasilkan sebuah pekerjaan penuh dan harga yang stabil dan oleh karena itu peran pemerintah sendiri mengejar kebijakan stabilisasi yang di sengaja. Makna teori yang di sampaikan oleh Keynes sendiri menandakan bahwa kebijakan stabilisasi ini dapat dilakukan dengan cara sengaja ketika ada sebuah problem dalam pasar.

Menurut Jack C. Plano mengatakan bahwa kebijakan stabilitas merupakan kondisi yang sudah mantap dan telah disepakati dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan stabilisasi perekonomian yaitu suatu syarat yang harus di capai dalam menyejahterakan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang makmur.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah *Literature Review* atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review*, *literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu Cooper (2010). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan studi kasus dan data dari jurnal-jurnal terdahulu, buku-buku, serta *review* yang berkaitan dengan stabilisasi

pemerintah pasca covid-19 terhadap sektor ekonomi. Sumber data yang tercantum pada penelitian ini diperoleh dari BPS, FAO, dan *outline* yang bisa diakses melalui daring.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia Pasca Covid-19 Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah mengambil kebijakan pasokan bahan pangan dengan sasaran pemerataan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah merumuskan kebijakan penguatan ketahanan pagan nasional. Dalam aspek pembiayaan, Pemerintah telah menerbitkan bantuan Kredit Usaha Rakyat yang bisa didapatkan oleh masyarakat dalam sektor pertanian dengan bunga yang kecil yaitu sebesar 3 persen. Pada Kredit Usaha Rakyat di tahun 2022 Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 373,17 triliun.

Pada aspek kelembagaan, Pemerintah membuat upaya dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Kewenangan yang di lakukan Lembaga ini adalah pengelolaan Cadangan pangan Pemerintah, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga, pencehgaan wilayah rentan dan rawan pangan, mengutatkan sistem logistik pangan dan pengembangan potensi pangan lokal.

Langkah awal seperti memperkuat Cadangan Beras Pemerintah, telah disahkan kebijakan dengan pembelian gabah atau beras petani yang di pegang khusus oleh Perum BULOG hingga Cadangan Beras Pemerintah mencapai 1,2 juta ton. Kegiatan ini bertujan untuk memperluas kapasitas Perum BULOG dalam menyerap Produksi Petani pada tahun 2022, dan secara langsung menccegah jatuhnya harga di tingkat petani. Pemerintah juga meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong untuk diversifikasi pangan lokal.

Pemerintah juga harus memperhatikan spesialisasi dari setiap daerah, dengan tujuan mengeskpor makanan tersebut ke daerah yang mempunyai sumber pangan yang rendah. Hal ini untuk mencegah sebuah wilayah agar tidak

mengalami kelangkaan dan kelimpahan pangan yang akan mempengaruhi harga pangan tersebut.

Pengembangan pemerintah juga terjadi di Kawasan sentra mandiri pangan yang berbasis korporasi petani, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian melalui Program Food Estate di wilayah Indonesia seperti, Jawa Tengah nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Sumatra Utara, dan kegiatan lain yaitu Program *Closes Loop* yang di kembangkan di Sukabumi, Garut dan Sikka.

Upaya selanjutnya untuk merealisasikan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia akan melakukan pengesahan kendaraan listrik. Pada tahun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2020 Pemerintah telah melakukan *public launching* Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, pada siaran itu tujuan dari pemerintah mengeluarkan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai adalah untuk mengurangi tekanan pada pembayaran Indonesia yang disebabkan impor bahan bakar minyak.

Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan minyak di masa depan, tetapi masih banyak hambatan dan kendala dalam aspek seperti, tata Kelola, kultural, ekonomi, lingkungan, dan psikologis. Tetapi jika Indonesia berhasil menaikan jumlah populasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Indonesia tidak akan tertinggal dengan negara lain dalam sektor teknologi, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa daerah di Indonesia sudah mengesahkan anggaran untuk mengembangkan populasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai masuk ke dalam APBD daerah masing masing. Tetapi masih banyak daerah yang menolak dengan pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Meski Presiden RI Joko Widodo akan mengesahkan pengembangan ini.

Upaya terkahir yang direncanakan Pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah penggunakaan bio diesel yang akan ditingkatkan. Biodiesel. Ada banyak aspek positif yang ditimbulkan dengan adanya pengunggunaan biodiesel, karena sebagai cara alternatif untuk bahan

bakar fosil yang semakin menipis. Biodisel merupakan opsi atau pilihan jika kemampuan ekonomi Indonesia tidak mampu mengembangkan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai.

Tiga kegiatan pemerintah yang direncanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, yang memiliki resiko kecil dan alternatif adalah cadangan pangan. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris maka cadangan pangan sangat efektif dilakukan, dengan kegiatan pengesahan dan pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai akan menimbulkan penolakan yang dilakukan masyarakat.

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah pada tahun 2022 yang harus tetap dilaksanakan adalah, kebijakan ekonomi nasional bagi UMKM Indonesia. Pemerintah harus mendukung UMKM Indonesia agar Go Digital dan Go Global, UMKM Indonesia cukup membantu dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Tetapi kebijakan Pemerintah belum sepenuhnya mendukung UMKM Go Global.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) menyatakan bahwa presentase UMKM di Indonesia berada pada presentase 98,68% dari banyaknya sektor usaha di Indonesia. Ada beberapa hal yang mendasari pembentukan UMKM di Indonesia yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia karena banyaknya permintaan dari masyarakat. UMKM di Indonesia mayoritas berbasis non pertanian. Inovasi dan tingkat kreatifitas yang dimilki oleh sebuah pelaku UMKM menjadi keunggulan utama. Pemanfaatan teknologi dalam sektor UMKM membuat UMKM memiliki peningkatan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia yang semakin meningkat didasarkan kepada data yang diperoleh dari survey Badan Pusat Statistika (BPS) dengan total nilai 52,25 unit usaha ditahun 2009 menjadi 64,19 pada tahun 2017 hal tersebut yang mendukung bahwasannya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor UMKM sangat berpengaruh.

UMKM yang sempat terhenti pada awal tahun 2020, dan sudah berjalan kembali secara perlahan di dua tahun terakhir. Dengan era digital ini Pemerintah harus memanfaatkan digitalisasi dan mengenalkan UMKM Indonesia di mata

dunia, dengan memberi dukungan berupa modal maupun transaksi produsen dan konsumen. Seperti mempermudah proses ekspor barang UMKM dan mengurangi impor barang dari luar negeri. Pemanfaatan UMKM terjadi saat Presidensi G20 Indonesia yang terlaksana di Bali, menjadi ajang penunjuk UMKM Indonesia di mata dunia.

Selain kebijakan kebijakan yang di buat peintah juga harus memikirkan kemungkinan gangguan dari luar seperti, perang Ukraina Rusia dan Amerika China yang bersaing dalam perdagangan. Ada dampak langsung yang terjadi dengan adanya perang Ukraina Rusia yaitu kenaikan harga komoditas dan mempengeruhi Pertumbuhan ekonomi terhadap negara yang terlibat.

Indonesia termasuk negara yang terlibat dengan Rusia secara kolektif, karena Rusia telah aktif dalam politik ASEAN, Rusia telah menandatangani Kerjasama dengan ASEAN. Terdapat lima bidang yaitu, peningkatan dialog tingkat tinggi, konsultasi berkelanjutan antara pejabat ekonomi, meningkatkan dialog komunitas bisnis antar negara ASEAN, dan perdagangan dan investasi lintas batas.

Pengaruh Stagflasi Kenaikan Suku Bunga Indonesia Pasca Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Saat ini perekonomian Indonesia masih relatif kuat, inflasi masih terkendali dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5,1%. Pasar saham Indonesia juga relatif positif, meski beberapa pasar saham di Asia dan Pasifik melemah. Kita juga bisa mencari cara untuk menghasilkan uang, salah satunya adalah 20% dari dana kita dapat dialokasikan ke dana darurat untuk investasi di instrumen yang sangat likuid dan kita harus mempersiapkannya secara disiplin.

Semakin tinggi rasionya, semakin siap kita memenuhi kebutuhan di tengah resesi ekonomi. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah preventif dan proaktif terhadap kemungkinan terjadinya krisis terbuka. Jika rupiah terus melemah dan inflasi meningkat, Bank Indonesia (BI) tentu akan kembali menaikkan suku bunga. Pertumbuhan kredit terancam melemah lebih lanjut, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

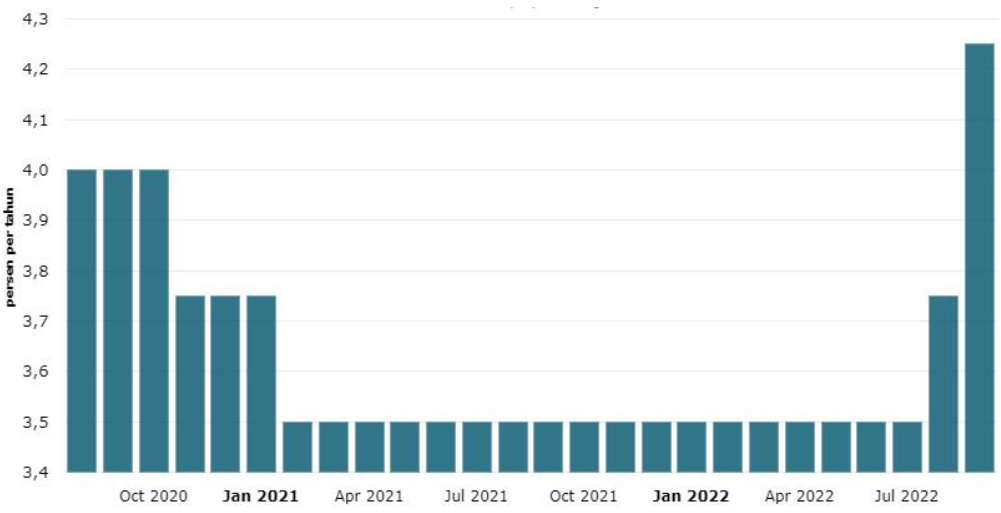

Gambar 1. Nilai suku bunga di Indonesia Oktober 2020-Juli 2022

Sumber: Bank Indonesia, Katadata.co

Berdasarkan data Bank Indonesia yang disajikan dalam gambar diatas Indonesia mengalami kenaikan suku bunga dari bulan April 2022 ke bulan Juli 2022 dari 3,5% menuju ke 4,2%. Nilai suku bunga bulan April 2021 sampai Juni akhir mengalami kestabilan suku bungan dengan presentase 3,5%. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika mengalami sebuah kenaikan suku bunga dengan melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar uang di pasar dengan terus mengendalikan inflasi.

Selain itu pemerintah juga melaksanakan proses pembayaran ke setiap daerah dengan merata tujuan dari percepatan proses pembayaran ini akan berdampak terhadap proses perputaran uang. Jika dikaitkan dengan teori fed maka hal yang harus dilakukan pemerintah yaitu dengan Ketidakstabilan permintaan uang telah menjadi isu politis bagi Fed. Pada 1993, gubernur Fed Alan Greenspan mengatakan agregat ini "tidak nampak memberikan indikasi perkembangan ekonomi dan tekanan harga yang dapat diandalkan". Selama tahun sebelumnya, *M*1 tumbuh 12 persen, *M*2 tumbuh 0,5 persen.

Bergantung pada bobot yang diberikan pada tiap ukuran, kebijakan moneter dapat sangat longgar, sangat ketat, atau di antaranya. Sejak itu, Fed membuat target untuk *tingkat dana federal*, tingkat bunga jangka-pendek yang

dipinjamkan bank kepada bank lain. Fed akan menyesuaikan tingkat bunga yang ditargetkan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang berubah.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam terlaksananya keberlanjutan ekonomi dalam suatu negara. Masyarakat memiliki peran dalam sebuah pembangunan ekonomi, karena indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi sendiri yaitu peran dari masyarakat. Sebuah negara memiliki sebuah strategi tersendiri dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dimana disana ada peran dari institusi, institusi berkaitan dengan perilaku ekonomi yang tidak sama dengan organisasi. Perilaku-perilaku ekonomi tersebut baik menguntungkan maupun tidak, memberikan timbal balik atau tidak, hal tersebut dilaksanakan dalam sebuah institusional formal maupun non formal. Sebagai salah satu contoh kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh institusional adalah adanya sebuah kebijakan, regulasi, maupun aturan. Sebelum melaksanakan kebijakan yang dibuat dan disahkan Pemerintah harus memikirkan dampak dan efisiensi dari kebijakan tersebut. Sehingga tidak menjadi kebijakan yang berbalik dan merugikan negara itu sendiri. Dan juga melihat kekuatan ekonomi yang dimiliki negara dengan kebijakan yang akan dibuat. Indonesia juga harus berhati hati dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi hal yang diinginkan pada Amerika Serikat dan Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi, Fitria, A. (2018). Pengaruh Jumlah Uang Beredar,Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol 7 (1). ISSN: 2338-4123

Devi Putri, Devi Valeriani, Anggraeni Yunita. (2021). The Effect of Inflation, Interest Rates, Exchange Rates, and Real GDP on Financial Deepening in Indonesia: Evidence from Error Correction Model Approach. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 19 (2). ISSN: 1829-5843.

Fadilla Salim A, Purnamasari A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 7 (1).

Hapsoro, N. A., & Bangun, K. (2020). Perkembangan pembangunan berkelanjutan dilihat dari aspek ekonomi di indonesia. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, *3*(2), 88-96.

Indriyani, N, S. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005 – 2015. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwapayana*, Vol 4 (2). ISSN: 2338 – 4794.

Kamal I, Fuad M. (2022). Pengaruh Strategi Perang Dagang Donald Trump Terhadap Hubungan Dagang Amerika Dan Tiongkok. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 7 (12). ISSN: 2541-0849

Kurniawan, R., & Managi, S. (2018). Economic growth and sustainable development in Indonesia: an assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *54*(3), 339-361.

Lucya, C., & Anis, A. (2019). Pengaruh teknologi dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, *1*(2), 509-511

Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, new normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *4*(2), 240-252.

Nurhayati, D. (2015). Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Dibidang Ekonomi. *Jurnal Heritage*, *3*(1), 33-48.

Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.

Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).

Rahayu, N., Supriyono, I. A., & Mulyawan, E. (2023). Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, *4*(1), 92-95.

Regina, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempenggaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, *11*(1), 36-45.

Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, *9*(1), 39-50.

Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *1*(2), 183-191.